

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Munculnya era globalisasi dan pasar bebas merupakan sunatullah dan wujud dinamika zaman yaitu masa yang pasti terjadi pada dunia yang semakin maju. Dengan ciri transparansi di berbagai bidang kehidupan tanpa mengenal batas teritorial suatu negara dan bangsa. Bagi negara maju telah mempersiapkan diri sejak lama dengan berbagai kemampuan agar masyarakatnya mampu menghadapi masa yang penuh kompetitif, tetapi bagi negara berkembang seakan sulit mengejar ketertinggalannya, terutama dalam segi perekonomian.

Berkembangnya Bank-Bank Syariah dinegara-negara Islam berpengaruh besar terhadap negara Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A Penuata Atmaja, M.Dawam Raharjo, M.Amien Rais dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan.

Akan tetapi prakasa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisana Bogor Jawa Barat, berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank

Islam di Indonesia. Dan Bank Islam yang pertama didirikan di Indonesia Bank Muamalat Indonesia.¹

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan Bank-Bank yang berprinsip Syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.² Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW “ kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.³

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dananya.⁴ Namun dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan secara matang jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta memilih-milih nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah diartikan suatu kondisi dimana terdapat

¹ Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Tori ke Praktek*. Cet Ke – 1, Jakarta : Gema Insani. hlm 25

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Depkripsi dan Ilustrasi*, Cet Ke-1 jakarta :Ekomosia, hlm 85

³ Ibid, hlm 85

⁴ Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-1 Jakarta : Kencana, 2009, hlm 457

suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga.⁵ Apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah, maka dilakukan penanggulangan pembiayaan bermasalah demi menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

Pada BMT Bahtera Pekalongan pada tahun 2011 terhitung kurang lebih 2,59% yang mengalami pembiayaan bermasalah maka salah satu untuk mengatasi pembiayaan-pembiayaan bermasalah perlu dilakukannya strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan salah satu penanggulangan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan perhitungan NPF (Non Performing Finance).

Pada akad murabahah BMT Bahtera menggunakan sistem jual beli, dimana penjualan barang kepada anggota/calon anggota dilakukan atas dasar cost-plus profit. Dalam akad murabahah pihak BMT Bahtera selaku penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada anggota sebagai pihak pembeli yang kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan bersama.⁶

Dari uraian diatas, peneliti tertarik pada produk pembiayaan dengan akad murabahah yang ada di KJKS BMT BAHTERA Pekalongan, sehingga penulis mengambil judul tentang “STRATEGI PENANGANAN

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah no. 35.2/Per/M.KUKM/2007

⁶ Wiroso, SE, MBA, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, Hal. 24

PEBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT BAHTERA PEKALONGAN”

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KJKS BMT BAHTERA Pekalongan?
2. Sejauhmana upaya pihak BMT untuk mengantisipasi nasabah supaya tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BAHTERA Pekalongan
2. Untuk mengetahui sistem yang diterapkan BMT untuk mengantisipasi nasabah agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan

1.4. Manfaat

Dengan mengadakan praktek lapangan (Magang) di KJKS BMT BAHTERA Pekalongan, manfaat yang hendak diambil oleh penulis adalah :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengetahui strategi yang diterapkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

Harapan penulis hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi KJKS BMT Bahtera Pekalongan dan lembaga keuangan Syari'ah lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan Syari'ah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah : rumusan tata cara tertentu secara sistematis untuk membahas sesuatu yang dimaksudkan agar kerja tersebut bisa di capai sesuai apa yang di harapkan dan benar.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

⁷ Prof Drs, Sutrisno hadi, "*Metodologi Rieseach*," Fak Psikologi UGM, Yogyakarta, 182, hlm 24

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer adalah informasi tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹⁰ Data sekunder yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah lampiran formulir, brosur, dan modul tentang produk-produk KJKS BMT BAHTERA Pekalongan.

⁸ Prof. Dr. Lexy J. Moelong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet ke-24, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007 hlm 6

⁹ Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 83

¹⁰ Ibid, hlm 116

3. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari konsep penelitian yang ada bahwa penelitian tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut adalah:

a. Metode Dokumentasi

Adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan dalam penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Metode Observasi

Adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu).¹¹ Disini pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana proses pengajuan pembiayaan sampe pencairan pembiayaan dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

c. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden.¹²

Di sini penulis mewawancarai beberapa karyawan KJKS BMT

¹¹ Husein Umar. Op cit., hlm. 116

¹² Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001, hlm. 125

Bahterara Pekalongan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rencana penelitian ini akan disusun dalam 4 bab. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai masalah yang akan diteliti.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini, dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. GAMBARAN UMUM BMT BAHTERA PEKALONGAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang sejarah berdirinya BMT, visi misi dan tujuan KJKS BMT Bahtera Pekalongan, struktur organisasi, produk-produk BMT Bahtera Pekalongan dan lokasi.

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas pengertian Murabahah, dasar hukum, rukun murabahah, mekanisme pembiayaan murabahah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan upaya BMT menghindari pembiayaan bermasalah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.